

# DOKUMENTASI KEGIATAN

## 2025/08/21/A4 Membuat video animasi 'Proses Penegakan Hukum Pidana' tahap 1 (pengumpulan aset)

The screenshot displays a presentation software interface with a video player and a script editor. The video player shows a news report from Metro TV titled "KORUPSI TIMAH, KERUGIAN NEGARA 300 TRILIUN RUPIAH". The script editor contains the following text:

```
HPL01-02 Sistem Penegakan Hukpid.md X
enegakan Hukpid > HPL01-02 Sistem Penegakan Hukpid.md > # PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI SEKTOR PERTAMBANGAN > ## Visual Suggestions: 8 rekomendasi visual > ### BAGIAN 1: PEMBUKAAN (0:00-0:45)
9 # PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI SEKTOR PERTAMBANGAN
12
13 ## Visual Suggestions: 8 rekomendasi visual
14
15 ---
16
17 ### BAGIAN 1: PEMBUKAAN (0:00-0:45)
18
19 Dalam era pembangunan ekonomi yang pesat, sektor pertambangan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di balik potensi ekonomi
yang besar, sektor ini juga rentan terhadap berbagai pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.
20
21 Selamat datang dalam pembelajaran Penegakan hukum pidana di sektor pertambangan. Hari ini, kita akan mempelajari bagaimana sistem hukum pidana berperan
dalam menjaga ketertiban dan keadilan di sektor pertambangan. Mulai dari memahami konsep dasar penegakan hukum pidana, mengidentifikasi berbagai jenis
kejahatan yang sering terjadi, hingga mengenal lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.
22
23 **Visual:** Montase foto kegiatan pertambangan Indonesia dengan overlay grafik statistik pelanggaran hukum pertambangan
24
25 ---
26
27 ### BAGIAN 2: KONSEP DASAR PENEGAKAN HUKUM PIDANA (0:45-2:00)
28
29 Mari kita mulai dengan memahami pengertian penegakan hukum pidana. Menurut Profesor Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk
mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kenyataan. Sedangkan untuk penegakan hukum pidana, Profesor Barda Nawawi Arief
mendefinisikannya sebagai bagian dari hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat melalui penerapan sanksi yang adil dan
proporsional. Profesor Jimly Asshiddiqie melengkapi definisi tersebut menjadi proses aplikatif dari hukum pidana substantif yang dijalankan oleh
aparatus penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat
30
31 Dalam konteks pertambangan, penegakan hukum pidana memiliki karakteristik khusus. Ia tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran, tetapi juga menjaga
keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Penegakan hukum di sini bersifat represif atau menekan
melalui pemberian sanksi pidana, dan juga preventif atau pencegahan melalui pembinaan dan pengawasan.
32
33 Tujuan penegakan hukum pidana dalam pertambangan mencakup tiga tujuan utama.
34 Pertama, menciptakan kepastian hukum (rechtszekerheid). Artinya, aturan harus ditegakkan secara konsisten. Jika tidak, hukum hanya jadi pajangan.
35 Kedua, memberikan keadilan. Setiap pihak-perusahaan, masyarakat, negara-harus diperlakukan sama. Pelanggar harus dihukum, korban harus dilindungi.
36 Ketiga, memberikan perlindungan hukum. Ini berarti negara hadir untuk melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang, termasuk eksploitasi sumber daya
alam yang merugikan.
37
38 **Visual:** Diagram piramida menunjukkan hierarki tujuan penegakan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum
```